DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

TESIS

Disampaikan sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Mencapai Gelar Magister Ilmu Ekonomi (ME)
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

NADYA MARCELLA
NIM. B2052232001

PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	:	Nadya Marcella
NIM	:	B2052232001
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul proposal	:	Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.
Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 15 Juli 2025



Nadya Marcella
NIM. B2052232001

PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

Nama	:	Nadya Marcella
NIM	:	B2052232001
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul proposal	:	Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

Menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 15 Juli 2025



Nadya Marcella
NIM. B2052232001

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Ini diajukan oleh :

Nama	:	Nadya Marcella
NIM	:	B2052232001
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Tanggal Ujian	:	25 Juli 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Utama	Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si. NIP. 19640428 198903 1 004	5/8/2025	
Pembimbing Pendamping	Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si. NIP. 19621229 198810 1 001	11/8/2025	
Ketua Penguji	Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A. NIP. 19630815 198703 1 005	31/7/2025	
Anggota Penguji	Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si. NIP. 19720607 199803 2 001	1/8/2025	

Pontianak, 11/8/ 2025
Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si.
NIP. 19720607 199803 2 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya yang senantiasa menyertai dalam proses menutut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, serta atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia". Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materi, doa, tenaga, pikiran, maupun motivasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Erni Pancakurniasih, S.E., M.Si selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran, serta arahan yang membangun demi penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak Dr. Windhu Putra, S.E, MS selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Akhmad Yani, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala ilmu, waktu, dan perhatian yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang dibagikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya dan membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat.
6. Bapak Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A. selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan, saran, serta arahan yang membangun demi penyempurnaan tesis ini.
7. Seluruh jajaran dosen pengajar Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Pengelola dan staf Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orangtua saya, Bapak Muhammad Shayuti dan Ibu Hasanah Bacok, yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materi maupun moral, serta tak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.
10. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi angkatan XXXII yang telah memberikan semangat, kerja sama, serta kontribusi dalam diskusi-diskusi yang membangun selama masa studi. Penulis sangat menghargai

kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

11. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan tesis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan, kontribusi, dan kerjasamanya sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik dan diwaktu yang tepat.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi para pembaca.

Pontianak, 15 Juli 2025



Nadya Marcella
NIM. B2052232001

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Nadya Marcella
Email: nadyamarcella02@gmail.com

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara atau daerah. Di beberapa negara berkembang salah satunya Indonesia, tantangan dalam penyerapan tenaga kerja semakin kompleks seiring dengan perubahan struktur ekonomi. Dilihat secara keseluruhan provinsi di Indonesia menunjukkan angka partisipasi kerja di atas 90%. Namun, masih terdapat ketimpangan antar wilayah dalam penyerapan tenaga kerja. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh distribusi PDRB sektor pertanian, distribusi PDRB sektor pertambangan, indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasis (IP-TIK), dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Data yang digunakan yaitu data panel yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan distribusi PDRB sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Distribusi PDRB sektor pertambangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kata kunci: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Teknologi, Pembangunan Tenaga Kerja, Penyerapan Tenaga Kerja

DETERMINANTS OF LABOR ABSORPTION IN INDONESIA

Nadya Marcella
Email: nadyamarcella02@gmail.com

ABSTRACT

Labor absorption is one of the important indicators in assessing the economic performance of a country or region. In several developing countries, including Indonesia, the challenges in labor absorption are increasingly complex along with changes in economic structure. Overall, the provinces in Indonesia show labor participation rates above 90%. However, there are still inequalities between regions in labor absorption. The purpose of this study is to examine and analyze the effect of agricultural sector GRDP distribution, mining sector GRDP distribution, information and communication technology development index (IP-ICT), and employment development index (IPK) on employment absorption in Indonesia. The data used is panel data consisting of 34 provinces in Indonesia during the period 2019 to 2023. This research uses panel data regression method. The results of this study show that the distribution of GRDP in the agricultural sector has a negative and significant effect on labor absorption. The distribution of GRDP in the mining sector has a negative and insignificant effect on employment. The information and communication technology development index (IP-ICT) has a positive and insignificant effect on employment.

Keywords: Agriculture Sector, Mining Sector, Technology, Labor Development, Labor Absorption

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

RINGKASAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara atau daerah. Dilihat secara keseluruhan provinsi di Indonesia menunjukkan angka partisipasi kerja di atas 90%. Beberapa provinsi seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 97% pada tahun 2023. Namun, masih terdapat ketimpangan antar wilayah dalam penyerapan tenaga kerja. Pada provinsi Jawa Barat (92,56%) dan Banten (92,48%) menunjukkan persentase penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Ketimpangan penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah tidak terlepas dari perbedaan struktur ekonomi daerah dan distribusi sektor-sektor unggulan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data distribusi PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan kontirbusi yang lebih besar dibandingkan sektor pertambangan meskipun mengalami sedikit penurunan dari 13,7% (2020) menjadi 12,53% (2023). Sebaliknya, sektor pertambangan mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 7,26% (2019) ke titik terendah 6,43% (2020) lalu meningkat signifikan menjadi 12,22% (2022) sebelum sedikit menurun lagi menjadi 10,52% (2023). Selain itu, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi sosial-ekonomi di berbagai daerah yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) terus mengalami peningkatan di hampir seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pencapaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan dalam suatu daerah. Secara nasional IPK mengalami peningkatan dari 61,06 (2019) menjadi 69,62 (2023). Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan ketenagakerjaan, seperti peningkatan akses terhadap lapangan kerja, perbaikan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Jika dilihat secara lebih lanjut terdapat beberapa provinsi dengan IPK yang tinggi pada tahun 2023 antara lain DKI Jakarta (82,69), Kalimantan Timur (79,13), DI Yogyakarta (76,62) dan Kalimantan Utara (74,28). Namun, beberapa provinsi seperti Papua (27,62) dan Papua Barat (47,36) menunjukkan IPK yang rendah. Dengan demikian, analisis terhadap determinan penyerapan tenaga kerja, khususnya dari aspek distribusi PDRB, pembangunan TIK, dan pembangunan ketenagakerjaan, menjadi penting dalam mendukung strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara distribusi PDRB sektor pertanian, distribusi PDRB sektor pertambangan, indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK), dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini yaitu eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat pada variabel distribusi PDRB sektor pertanian, distribusi

PDRB sektor pertambangan, indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK), dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019-2023. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel dengan model penelitian yang digunakan yaitu *fixed effect* dengan bantuan eviews 9.

3. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat berdasarkan pengaruh masing-masing variabel menunjukkan bahwa distribusi PDRB sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang tercermin dalam meningkatnya kontribusi terhadap PDRB, tidak selalu diikuti oleh peningkatan serapan tenaga kerja. Disisi lain, distribusi PDRB sektor pertambangan memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan distribusi sektor pertambangan tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, IP-TIK memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi informasi berkembang, peningkatan tersebut belum dapat mendorong penciptaan lapangan kerja secara langsung. Kemudian, IPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, semakin tinggi nilai IPK suatu provinsi, semakin baik pula penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Hubungan ini menunjukkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan yang mencakup peningkatan kompetensi, akses terhadap peluang kerja yang layak, dan sistem ketenagakerjaan yang inklusif berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif.

4. Kesimpulan dan Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi PDRB sektor pertanian memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Distribusi PDRB sektor pertambangan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) berpengaruh positif dan siginifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih padat karya. Selain itu, diperlukannya peran pemerintah dalam menyediakan program pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani agar mereka mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi modern. Diperlukannya perluasan akses infrastruktur digital serta menyelaraskan pelatihan teknologi dengan kebutuhan industri agar teknologi tidak hanya menjadi pengganti tenaga kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja baru. Diperlukannya peningkatan kualitas dan cakupan program pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini mencakup penguatan pelatihan vokasional, peningkatan akses terhadap informasi pasar kerja, penciptaan sistem ketenagakerjaan yang inklusif, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal. Pembangunan ketenagakerjaan yang terintegrasi akan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TESIS ii
PENGESAHAN TESIS iii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.2.1 Pernyataan Masalah 9
1.2.2 Pertanyaan Penelitian 9
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Kontribusi Penelitian 10
1.4.1 Kontribusi Teoritis 10
1.4.2 Kontribusi Praktis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Landasan Teori 11
2.1.1 Model dua-sektor Lewis 11
2.1.2 Teori Schumpeter 12
2.1.3 Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) 14
2.2 Tinjauan Empiris 19
2.2.1 Distribusi PDRB Sektor Pertanian 19
2.2.2 Distribusi PDRB Sektor Pertambangan 20
2.2.3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 21
2.2.4 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 22
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 22
2.3.1 Kerangka Konseptual 22
2.3.2 Hipotesis Penelitian 23

BAB III METODE PENELITIAN 25
3.1 Bentuk Penelitian 25

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 25
3.3 Sumber dan Jenis Data 25
3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel..... 25
3.4.1 Distribusi PDRB Sektor Pertanian..... 25
3.4.2 Distribusi PDRB Sektor Pertambangan..... 26
3.4.3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 26
3.4.4 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 26
3.4.5 Penyerapan Tenaga Kerja 26
3.5 Metode dan Alat Analisis..... 27
3.5.1 Regresi Data Panel..... 27
3.5.2 Metode Estimasi Data Panel..... 27
3.5.3 Pemilihan Model Pengujian Data Panel 28
3.5.4 Uji Statistik 29

BAB IV PEMBAHASAN..... 31
4.1 Gambaran Kontekstual..... 31
4.2 Hasil Penelitian 35
4.2.1 Uji Seleksi Model 35
4.2.2 Uji Statistik 35
4.2.3 Hasil Uji Regresi Data Panel 38
4.3 Pembahasan..... 39
4.3.1 Pengaruh Distribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 39
4.3.2 Pengaruh Distribusi PDRB Sektor Pertambangan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 42
4.3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia . 45
4.3.4 Pengaruh Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 48

BAB V PENUTUP..... 52
5.1 Kesimpulan..... 52
5.2 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN..... 60

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Lapangan Pekerjaan Utama Sektor Pertanian dan Pertambangan 32
Tabel 4.2 Hasil Uji Seleksi Model 35
Tabel 4.3 Uji T 36
Tabel 4.4 Uji F 37
Tabel 4.5 Koefisien Determinasi (R^2) 37
Tabel 4.6 Hasil Uji Data Panel dengan Model Fixed Effect 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2019-2023 2
Gambar 1.2 Distrinbusi PDB Menurut Lapangan Usaha di Indonesia Tahun 2019-2023 4
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia Tahun 2019-2023 6
Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2019-2023 7
Gambar 2.1 Gambaran Konsetual..... 23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja di Indonesia 60
Lampiran 2. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Indonesia 61
Lampiran 3. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia 62
Lampiran 4. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia..... 63
Lampiran 5. Jumlah Petani dan Petani Umur 19-39 tahun dan/atau menggunakan teknologi digital menurut Provinsi dan Kriteria, 2023 64
Lampiran 6. Uji Chow..... 65
Lampiran 7. Uji Hausman 66
Lampiran 8. Regresi Data Panel dengan Model Fixed Effect..... 67

BAB I
PENDAHULUAN

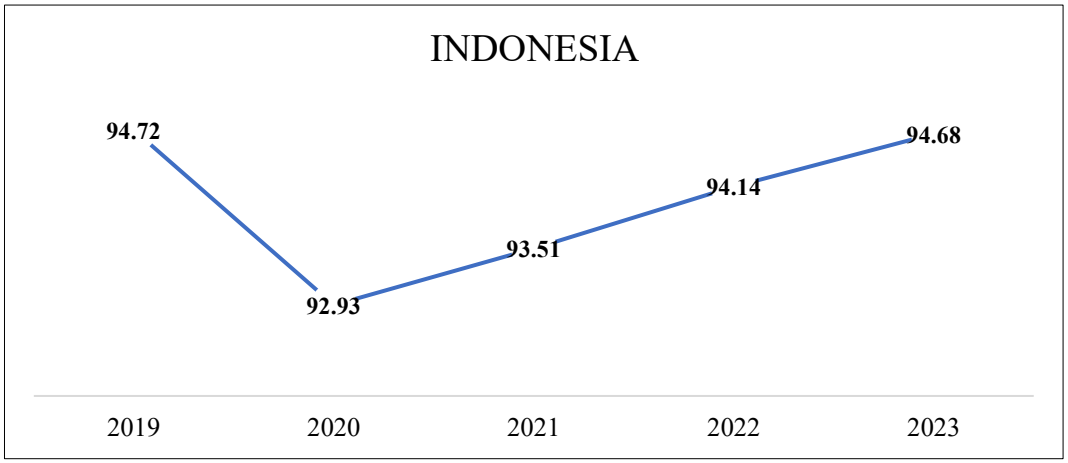
1.1 Latar Belakang

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara atau wilayah. Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di mana peningkatan output ekonomi disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, rendahnya penyerapan tenaga kerja dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta rendahnya investasi dalam sektor-sektor padat karya (Sanjani & Sari, 2024).

Di beberapa negara berkembang salah satunya Indonesia, tantangan dalam penyerapan tenaga kerja semakin kompleks seiring dengan perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang tidak diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja dalam hal keterampilan dan pendidikan. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi pola permintaan tenaga kerja. Sementara di beberapa sektor mengalami peningkatan kebutuhan tenaga kerja, sektor lain justru terjadi pengurangan akibat substitusi tenaga kerja manusia dengan teknologi (Nugraha dkk., 2023).

Terbatasnya peluang kerja bagi masyarakat akan menyebabkan tingginya angka pengangguran, sehingga nantinya mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena mereka yang tidak memiliki pekerjaan tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sehingga nantinya masyarakat tersebut akan rentan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus dan akan mempengaruhi kualitas hidup maupun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika kondisi ini terus berlangsung maka akan menimbulkan ketimpangan sosial serta memperburuk masalah pembangunan manusia dan ekonomi di suatu daerah (Sakdiyah & Taufiq, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam periode 2019 hingga 2023 *supply* tenaga kerja secara nasional menunjukkan tren peningkatan yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap tahunnya. Pada tahun 2019, TPAK nasional tercatat sebesar 67,53% dan meningkat menjadi 69,48% pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan semakin meningkatnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Dengan demikian, peningkatan TPAK menggambarkan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja serta mencerminkan membaiknya partisipasi masyarakat terhadap aktivitas ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, peningkatan *supply* tenaga kerja perlu diimbangi dengan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana penyerapan tenaga kerja dapat mengikuti pertumbuhan partisipasi angkatan kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 1.1 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2019-2023

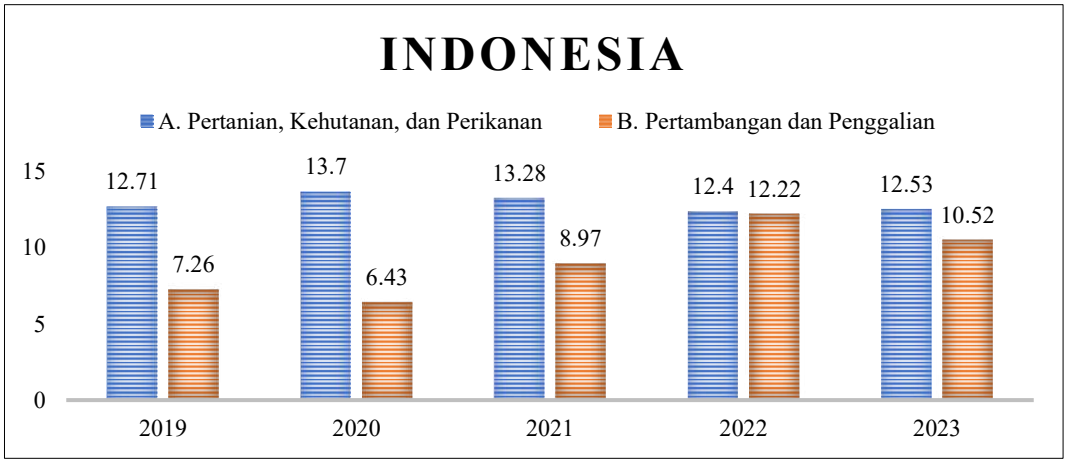
Berdasarkan pada gambar 1.1 dapat diketahui bahwa persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di Indonesia relatif tinggi dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Dilihat secara keseluruhan provinsi di Indonesia menunjukkan angka partisipasi kerja di atas 90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum tenaga kerja di Indonesia terserap cukup baik oleh pasar kerja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara nasional sistem ketenagakerjaan di Indonesia telah mampu menyediakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja dengan baik.

Beberapa provinsi seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 97% pada tahun 2023 (Lampiran 1, halaman 55). Hal ini menunjukkan bahwa di daerah-daerah tersebut sebagian besar penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja telah berhasil memperoleh pekerjaan. Namun, masih terdapat ketimpangan antar wilayah dalam penyerapan tenaga kerja. Pada provinsi Jawa Barat (92,56%) dan Banten (92,48%) (Lampiran 1, halaman 55) menunjukkan persentase penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di daerah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang masih rendah agar kesenjangan antarwilayah dapat diatasi.

Ketimpangan penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah tidak terlepas dari perbedaan struktur ekonomi daerah dan distribusi sektor-sektor unggulan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini dikarenakan sektor unggulan terutama yang tergolong sektor basis seperti pertanian dan pertambangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menghasilkan barang dan jasa yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga ditujukan untuk pasar di luar daerah. Ketika sektor-sektor ini mampu mengekspor produksinya maka daerah akan memperoleh pendapatan dari luar yang mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Peningkatan tersebut selanjutnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, dan terciptanya lebih banyak kesempatan kerja (Arsyad, 2017).

Dilihat dari gambar 1.2 mencerminkan besarnya kontribusi dua sektor ekonomi yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2019-2023. Sektor pertanian memberikan kontirbusi yang lebih besar dibandingkan sektor pertambangan meskipun mengalami sedikit penurunan dari 13,7% (2020) menjadi 12,53% (2023). Sebaliknya, sektor pertambangan mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 7,26% (2019) ke titik terendah 6,43% (2020) lalu meningkat signifikan menjadi 12,22% (2022) sebelum sedikit menurun lagi menjadi 10,52% (2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan maupun penggalian mengalami pertumbuhan yang pesat

dalam dua tahun terakhir, sementara sektor pertanian cenderung stabil namun sedikit menurun.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

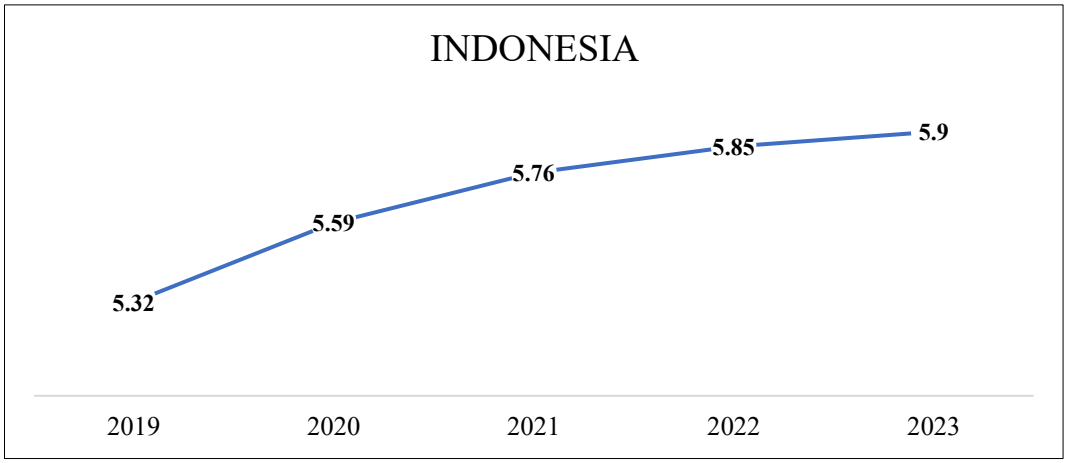
Gambar 1.2 Distrinbusi PDB Menurut Lapangan Usaha di Indonesia Tahun 2019-2023

Jika dilihat berdasarkan provinsi, data distribusi PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian memiliki disribusi yang bervariasi di setiap provinsi selama periode 2019 hingga 2023. Provinsi-provinsi seperti Sulawesi Barat, Gorontalo, Jambi dan Aceh menunjukkan dominasi sektor pertanian yang tinggi dalam struktur PDRB mereka dengan angka distribusi lebih dari 30% pada tahun 2023 (Lampiran 2, halaman 56). Sektor pertanian dikenal sebagai sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses terhadap sektor industri dan jasa. Hal ini ditunjukkan dengan angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada provinsi-provinsi dengan distribusi sektor pertanian yang tinggi seperti wilayah seperti Sulawesi Barat sebesar 97,73% (2023), Gorontalo 96,94% (2023), Jambi 95,47% (2023), dan Aceh 93,97% (2023). Disisi lain Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan memiliki struktur PDRB yang sangat bergantung pada sektor pertambangan dengan distribusi lebih dari 30% pada tahun 2023 (Lampiran 2, halaman 56). Dengan angka penyerapan tenaga kerja di masing-masing provinsi yaitu Kalimantan Utara sebesar 95,99% (2023), Kalimantan Timur 94,69% (2023), dan Kalimantan Selatan 95,69% (2023).

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Ketika nilai PDRB suatu daerah meningkat, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah tersebut mengalami pertumbuhan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dengan bertambahnya produksi, maka kebutuhan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat karena pelaku usaha memerlukan lebih banyak tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi yang semakin besar (Tarman dkk., 2022). Oleh karena itu, peningkatan PDRB di suatu daerah secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor-sektor yang bersifat padat karya seperti pertanian dan industri pengolahan.

Pada era digital saat ini, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kontribusi sektor-sektor ekonomi tradisional. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi aspek strategis yang mendorong transformasi di berbagai sektor kehidupan. Infrastruktur digital yang semakin berkembang memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan (Agustina dkk., 2023).

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indikator yang dibentuk untuk melihat perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di suatu negara atau wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam periode 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan secara konsisten. Hal tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam pembangunan TIK pada provinsi-provinsi di Indonesia. Peningkatan nilai indeks TIK mencerminkan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

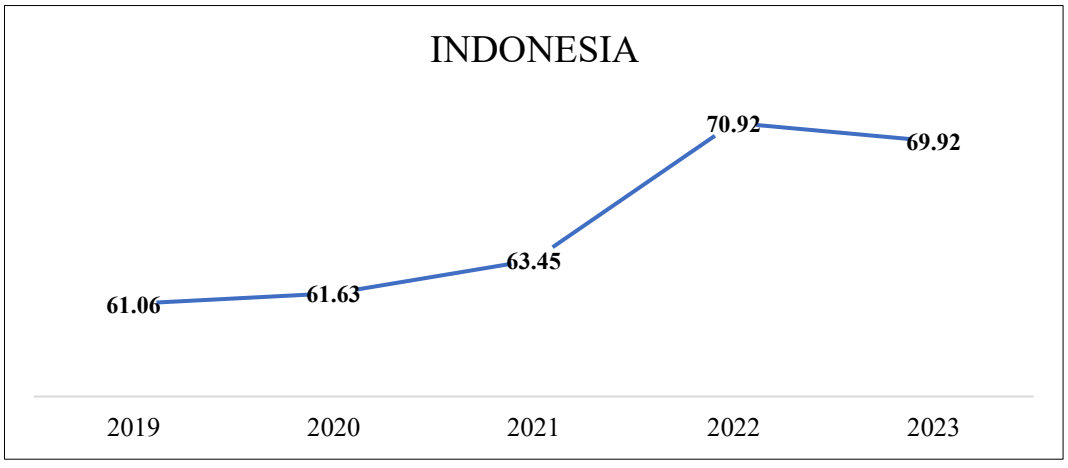
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia Tahun 2019-2023

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi sosial-ekonomi di berbagai daerah. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) yang terus mengalami peningkatan di hampir seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Berdasarkan data terlampir menunjukkan bahwa sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta (7,73), DI Yogyakarta (7,26), dan Kalimantan Timur (6,66) mencatat nilai IP-TIK tertinggi pada tahun 2023 (data terlampir: Lampiran 3). Sebaliknya, provinsi seperti Papua (3,43) dan Nusa Tenggara Timur (5,33) masih menunjukkan capaian IP-TIK yang relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,9 (Lampiran 3, halaman 57). Tingkat perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di suatu daerah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK). Semakin tinggi nilai indeks tersebut, maka semakin besar pula potensi dan kemajuan pembangunan TIK di wilayah tersebut. Sebaliknya, nilai indeks yang rendah mencerminkan masih terbatasnya perkembangan dan pemanfaatan TIK (Davani & Sulistyaningrum, 2022).

Perbedaan capaian IP-TIK antarwilayah mengindikasikan ketimpangan dalam akses, penggunaan, dan keahlian TIK yang akan berpotensi memengaruhi dinamika ketenagakerjaan. Daerah dengan indeks TIK yang tinggi umumnya memiliki infrastruktur digital yang lebih memadai, kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dalam hal literasi digital, serta ekosistem inovasi yang lebih berkembang. Sehingga kondisi tersebut memungkinkan terciptanya peluang kerja baru. Sebaliknya, daerah dengan indeks TIK yang rendah masih menghadapi

keterbatasan dalam infrastruktur, pendidikan teknologi, dan akses terhadap informasi digital yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja khususnya dalam sektor-sektor ekonomi yang berbasis teknologi. Hal ini memberikan arti bahwa pembangunan TIK tidak hanya penting sebagai penopang modernisasi ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkualitas di era digital. Kondisi tersebut sejalan dengan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK), yang merupakan indikator komposit untuk mengukur kinerja pembangunan ketenagakerjaan suatu daerah, termasuk di dalamnya aspek kesempatan kerja, kualitas angkatan kerja, dan produktivitas (Putra, 2024).

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah indikator menyeluruh yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan dalam suatu daerah dengan menggunakan 9 indikator utama yang mencerminkan berbagai dimensi penting dari pembangunan ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023, IPK nasional mengalami penurunan sebesar 0,99 poin, dari 70,92 (2022) menjadi 69,92 (2023). Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan, meskipun beberapa indikator utama seperti perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, serta produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan.



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2025
Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2019-2023

Berdasarkan data pada gambar 1.4 IPK Indonesia meningkat dari 61,06 (2019) menjadi 69,62 (2023). Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan

dalam berbagai aspek pembangunan ketenagakerjaan, seperti peningkatan akses terhadap lapangan kerja, perbaikan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas.

Jika dilihat berdasarkan provinsi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Provinsi dengan IPK tertinggi pada tahun 2023 antara lain DKI Jakarta (82,69), Kalimantan Timur (79,13), DI Yogyakarta (76,62) dan Kalimantan Utara (74,28). Hal tersebut mencerminkan bahwa provinsi-provinsi tersebut memiliki struktur ketenagakerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, beberapa provinsi seperti Papua (27,62) dan Papua Barat (47,36) menunjukkan IPK yang rendah (Lampiran 4, halaman 58). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan di wilayah tersebut masih tinggi, terutama terkait dengan keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja yang terbatas, serta minimnya infrastruktur pendukung. Meskipun sebagian besar provinsi mengalami peningkatan IPK, kesenjangan antarwilayah tetap menjadi isu penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan spesifik untuk memperkuat pembangunan ketenagakerjaan di wilayah-wilayah yang tertinggal, agar pertumbuhan ketenagakerjaan dapat berlangsung secara merata dan berkeadilan di seluruh provinsi (Maryanti & Hardi, 2016).

Terjadinya penurunan IPK memiliki implikasi langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Daerah dengan IPK yang lebih tinggi cenderung memiliki infrastruktur ketenagakerjaan yang lebih baik, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang memadai, serta sistem hubungan industrial yang kondusif, yang dimana semuanya berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, daerah dengan IPK rendah seringkali menghadapi kendala dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Sehingga, perencanaan tenaga kerja perlu dilakukan secara serius dan konsisten baik di tingkat nasional maupun daerah agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor secara tepat. Perencanaan yang terarah memungkinkan penyediaan tenaga kerja, baik untuk sektor swasta maupun pemerintah sehingga berjalan efektif. Dengan demikian, tenaga kerja yang disiapkan secara optimal diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah pekerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Hapsari & Jalunggono, 2021).

Dengan demikian, analisis terhadap determinan penyerapan tenaga kerja, khususnya dari aspek distribusi PDRB, pembangunan TIK, dan pembangunan ketenagakerjaan, menjadi penting dalam mendukung strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa meskipun tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia secara umum cukup baik yang dimana sebagian besar provinsi mencatat persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja di atas 90% selama lima tahun terakhir. Namun, berdasarkan data juga menunjukkan adanya ketimpangan penyerapan tenaga kerja antarwilayah yang cukup signifikan. Ketimpangan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, seperti perbedaan struktur ekonomi yang tercermin dalam distribusi PDRB pada sektor pertanian dan pertambangan, tingkat kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilihat melalui Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK), serta kualitas sistem ketenagakerjaan yang tercermin dari Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan berperan dalam memengaruhi penyerapan tenaga kerja di berbagai provinsi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana distribusi PDRB sektor pertanian dan pertambangan, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), serta Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebagai dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan pernyataan masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh distribusi PDRB sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja?
2. Apakah terdapat pengaruh distribusi PDRB sektor pertambangan terhadap penyerapan tenaga kerja?
3. Apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) terhadap penyerapan tenaga kerja?
4. Apakah terdapat pengaruh indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) terhadap penyerapan tenaga kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh distribusi PDRB sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh distribusi PDRB sektor pertambangan terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) terhadap penyerapan tenaga kerja.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) terhadap penyerapan tenaga kerja.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan terkait teori *Lewis, Schumpeter* dan *Human Capital* yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.